

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KERSANING RATU DI DESA KERSARATU KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Anitasari^{1*}, Dini Yuliani², Ii Sujai³, Irfan Nursetiawan⁴
^{1,2,3,4} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi: anitasari200200@gmail.com

ABSTRAK

Kampung KB merupakan wilayah setingkat RW, dusun atau yang setara yang memiliki kriteria tertentu. Kampung Keluarga Berencana merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya komunikasi antara petugas dengan masyarakat setempat, PLKB yang belum mampu menggerakkan masyarakat dalam program kampung keluarga berencana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan. Adapun teknik pengolahan data/analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini informan yang digunakan yaitu sebanyak delapan orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan implementasi program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal, Dilihat dari empat dimensi dalam teori implementasi menurut George C. Edward III dalam (Agustino, leo 2020:154) Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yaitu dari ke empat dimensi tersebut masih ada beberapa indikator yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, di antaranya pertama di lihat dari komunikasi, penyampaian informasi yang dilakukan di rasa kurang jelas serta konsistensi petugas yang belum konsisten. Kedua di lihat dari disposisi, kurangnya pemahaman serta kemampuan petugas dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana. Sehingga perlu adanya pembinaan bagi petugas dalam penguasaan teknis di lapangan, menentapkan agenda pertemuan atau jadwal kegiatan dengan baik yang dapat dijadikan patokan oleh petugas sehingga konsistensi petugas dapat meningkat.

Kata Kunci : *Implementasi; Kampung KB; Desa*

ABSTRACT

Kampung KB is an area at the level of RW, sub-village or equivalent which has certain criteria. The Family Planning Village is an embodiment of the implementation of Nawacita development, namely developing Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. The purpose of this study is to determine the implementation of the Family Planning Village Program in Kersaratu Village, Sidamulih District, Pangandaran Regency. The research method used is a

qualitative research method with data collection techniques carried out by the author, namely interviews, observation and documentation with informants. The data processing/data analysis technique is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. In this study, eight informants were used. Based on the research conducted, the implementation of the Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu program in Kersaratu Village, Sidamulih District, Pangandaran Regency in general has been implemented but not optimal. Judging from the four dimensions in implementation theory according to George C. Edward III in (Agustino, leo 2020: 154) Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu in Kersaratu Village, Sidamulih District, Pangandaran Regency, namely from the four dimensions there are still several indicators that have not been maximized in their implementation, the first of which is seen from communication, the delivery of information that is carried out is felt to be unclear and the consistency of officers who have not been consistent. The second is seen from the disposition, lack of understanding and ability of officers in implementing the family planning village program. So that there is a need for training for officers in technical mastery in the field, setting a meeting agenda or schedule of activities properly which can be used as a benchmark by officers so that the consistency of officers can increase.

Keywords : *Implementation; Kampung KB; Village*

A. PENDAHULUAN

Kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Permasalahan kependudukan yang cukup rumit sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, maka dari itu agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan sensus kependudukan Indonesia pada tahun 2020 bahwa SP2020 telah mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Di lihat dari hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan bahwa penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa

atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. (www.bps.go.id).

Berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Penduduk dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. (www).

kampungkb.bkkbn.go.id). Dalam mengatasi permasalahan kependudukan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan program keluarga berencana yang merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Kampung KB yaitu wilayah setingkat RW, dusun atau yang setara yang memiliki kriteria tertentu yang dilakukan secara sistematis dan sistematis. Kampung KB adalah suatu program dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Kampung KB bukan hanya fokus pada penekanan laju pertumbuhan penduduk saja, akan tetapi juga fokus dalam upaya memberdayakan potensi masyarakat di daerah tersebut supaya bisa meningkatkan standar kesehatan dan perekonomian.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu berhubungan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, sehingga tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun

dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. (Aneta, A (2012)).

Menurut Mazmanian dan Sebatier pada Wahab (2012:135) bahwa Implementasi ialah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang artinya fokus perhatian implementasi kebijakan yakni peristiwa-peristiwa serta aktivitas-aktivitas yang muncul setelah disahkannya panduan-panduan kebijakan publik yang meliputi baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata di masyarakat.

Kebijakan publik diciptakan dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebijakan Publik Menurut Eulau & Prewitt (1973:465) dalam (Agustino, Leo 2020:15) menyatakan bahwa: "Kebijakan adalah 'keputusan tetap' yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut."

Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kersaratu ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati nomor 141 tahun 2018 tentang penetapan kampung keluarga berencana. dimana dilihat dari sensus penduduk di akhir 2020 dimana jumlah penduduk Desa Kersaratu yaitu sebanyak 2.591 jiwa dan sensus penduduk pada akhir 2021 penduduk Desa Kersaratu berjumlah 2.720 jiwa dimana akhir tahun

2020 hingga akhir 2021 jumlah penduduk di dusun Cilempung "Kampung KB Kersaning Ratu" yaitu 421 jiwa kini menjadi 445 jiwa.

UPTD KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau lebih dikenal dengan sebutan Balai Penyuluh KB merupakan ujung tombak pengelolaan KB di lini lapangan yang diberi tugas oleh DKBP3A sebagai koordinasi dalam mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana termasuk kampung KB di lingkup Kecamatan. Adapun implementasi menurut George C. Edward II yang dikenal dengan istilah *Direct and Indirect in Implementation*, dimana dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun indikator permasalahan berdasarkan teori dari George C. Edward III yang dapat dijadikan patokan yaitu :

1. Komunikasi, dimana menurut Edward III komunikasi sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian dari suatu kebijakan publik. Contohnya: PLKB masih mengandalkan komunikasi secara langsung tanpa media pendukung, sehingga paparan yang disampaikan kurang dapat dipahami oleh masyarakat.
2. Sumber Daya, dimana menurut Edward III bahwa sumber daya utama dalam pengimplementasian kebijakan yaitu manusia, dimana kegagalan suatu implementasi salah satunya yaitu disebabkan oleh Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Contohnya:

Banyak orang yang enggan mengikuti program kampung KB.

3. Disposisi, dimana sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang menentukan keberhasilan suatu program, dimana jika suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya akan lebih baik lagi. Contohnya: Kurang penguasaan teknik lapangan oleh petugas.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kampung KB Kersaning Ratu, Adapun indikator permasalahan yang terdapat di Kampung KB Kersaning Ratu Desa Kersaratu yaitu Petugas Lapangan KB belum mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana, kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang dan indikator permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran".

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan. Adapun teknik pengolahan data/analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Kebijakan implementasi juga sangat di tentukan oleh dimensi-dimensi yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan Adapun dimensi-dimensi implementasi menurut George C. Edward III (2020:145) yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Kampung KB yaitu wilayah setingkat RW, dusun atau yang setara yang memiliki kriteria tertentu yang dilakukan secara sistematis dan sistematis. Kampung KB adalah suatu program dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Kampung KB bukan hanya fokus pada penekanan laju pertumbuhan penduduk saja, akan tetapi juga fokus dalam upaya memberdayakan potensi masyarakat di daerah tersebut supaya bisa meningkatkan standar kesehatan dan perekonomian. Pada dasarnya kehadiran Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Program Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori menurut George C. Edward III, yaitu:

1. Komunikasi, dengan indikator:

- a. Adanya transmisi dari petugas pelaksana Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian bahwa transmisi informasi dari petugas pelaksana program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hal diantaranya dalam penyampaian informasi pegawai masih melakukannya secara langsung tanpa media pendukung serta terdapat beberapa informan yang mengatakan cukup baik dengan berbagai alasan tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi dengan indikator transmisi informasi dari petugas pelaksana program Kampung KB kepada masyarakat, belum berjalan dengan optimal.

- b. Adanya konsistensi petugas pelaksana dalam pelaksanaan program Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsistensi dari petugas pelaksana program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada beberapa hal yang membuat konsistensi petugas dinilai kurang, diantaranya

petugas masih mendadak dalam memberikan informasi dan penjadwalan kegiatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan indikator adanya konsistensi dari petugas pelaksana program Kampung Keluarga Berencana sudah berjalan namun optimal.

2. Sumber Daya

a. Adanya dukungan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dukungan masyarakat setempat dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara umum sudah berjalan namun belum optimal. hal ini dikarenakan masih ada beberapa hal yang membuat dukungan dari masyarakat belum bisa dikatakan optimal. diantaranya yaitu dukungan masyarakat dalam program lintas sektor yang masih kurang antusias.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi sumber daya dengan indikator adanya dukungan masyarakat setempat dalam melaksanakan program kampung keluarga berencana, secara keseluruhan sudah berjalan namun belum optimal.

b. Adanya kesadaran masyarakat setempat dalam pelaksanaan program kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa kesadaran masyarakat setempat dalam melaksanakan program

Kampung Keluarga Berencana Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya, keikutsertaan dalam program kampung KB, akan tetapi dalam program lintas sektor kesadaran masyarakat belum di katakan optimal tetapi sudah berjalan, hal ini dapat dilihat misalnya dari pengelolaan lahan kosong masyarakat hanya berjalan di awal penetapan program saja.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dimensi sumber daya dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan indikator adanya kesadaran masyarakat setempat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa sebagian informan mengatakan dukungan dan kesadaran masyarakat baik namun belum begitu maksimal karena dalam program lintas sektor masih kurang baik, namun secara keseluruhan kesadaran masyarakat sudah berjalan baik.

3. Disposisi

a. Pemahaman program Kampung KB oleh petugas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman program Kampung Keluarga Berencana oleh petugas belum berjalan secara optimal, hal ini di karenakan masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan maksimal, yaitu petugas belum maksimal dalam menyampaikan informasi dan belum

bisa mengaplikasikan informasi program dengan optimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi disposisi dengan indikator pemahaman program Kampung Keluarga Berencana oleh petugas pelaksana, belum berjalan dengan optimal.

b. Kemampuan petugas pelaksana dalam melaksanakan program Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemampuan petugas pelaksana dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan maksimal. diantaranya yaitu dilihat dalam penguasaan teknis dilapangan.

Denagan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi disposisi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan indikator kemampuan petugas pelaksana dalam melaksanakan program kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa sebagian informan mengatakan petugas belum optimal dalam memahami dan melaksanakan program serta dalam pengaplikasian dan teknik dilapangannya yang masih kurang baik.

4. Struktur Birikrasi

a. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan optimal.

Denagan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi struktur birokrasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan indikator adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana sudah berjalan dengan optimal.

b. Adanya SOP (*Standar Oprasional Prosedur*) yang jelas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa telah adanya SOP (*Standar Oprasional Prosedur*) yang jelas serta penerapan SOP (*Standar Oprasional Prosedur*) yang sudah berjalan dengan optimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi struktur birokrasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan indikator adanya SOP (*Standaar Optasional Prosedur*) yang jelas sudah berjalan optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Kersaning Ratu di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran bahwa, Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana

Kersaning Ratu Di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya yaitu adanya dukungan dan kesadaran masyarakat serta tanggung jawab yang jelas dan aspek struktur birokrasi yaitu adanya penerapan SOP dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas. Akan tetapi masi belum optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi dimana belum adanya transmisi informasi dari petugas dan konsistensi dari petugas serta dilihat dari aspek disposisi dimana pemahaman dan kemampuan petugas dalam nmelaksanakan program kampung KB belum optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino,Leo.2020.Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2..Bandung:CV Alfabeta

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.

Hasilsensus penduduk 2020” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. diakses pada 20 Oktober 2021.

Kampungkb.“Kampung Kb Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat“.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/>.Diakses pada 01 November 2021

Wahab,Solidin Abdul.2012.Analisis Kebijakan:dari formulasi penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.Jakarta:PT Bumi Aksara